



literasi
nusantara

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

PARTISIPASI KRISTEN DALAM DUNIA POLITIK

Di Era Pra Kemerdekaan
Hingga Orde Baru

Editor :
Ardianus Hulu, M.Pd



Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

PARTISIPASI KRISTEN DALAM DUNIA POLITIK

**Di Era Pra Kemerdekaan
Hingga Orde Baru**

**Editor :
Ardianus Hulu, M.Pd**



**PARTISIPASI KRISTEN DALAM DUNIA POLITIK
Di Era Pra Kemerdekaan Hingga Orde Baru**

Penulis : Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

ISBN : 978-623-329-359-4

Copyright © September 2021

Ukuran: 17,6 cm X 25 cm; Hal: vi + 76

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : Ahmad Ariyanto
Desainer Sampul : Annuha Zarkasyi
Editor : Ardianus Hulu, M.Pd

Cetakan I, September 2021

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Regency Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

KATA PENGANTAR

Buku tentang Partisipasi Kristen dalam dunia Politik di era Pra Reformasi Indonesia adalah buku sejarah tentang partisipasi Kristen baik semenjak Pra kemerdekaan hingga masa zaman Orde Baru Dalam buku ini dijelaskan bahwa Gereja dan orang Kristen di Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap bidang politik mengingat adanya beban tanggung jawab politiknya. Sepanjang sejarah kekristenan, rezim yang totaliter telah berusaha mensahkan suatu sikap ketaatan buta dan perhambaan mutlak kepada negara dengan mengutip Roma 13:1-7. Para wakil pemerintah atau para teolog yang bekerja sama dengan pemerintah biasanya menunjuk perkataan Rasul Paulus ini. Mereka menggunakan Roma 13:1-7 untuk memberikan negara kekuasaan yang mutlak dan 'ilahi'. Para penafsir yang haus akan kekuasaan hanya akan mencari ayat-ayat mengenai ketaatan saja dan berusaha mengabaikan aspek-aspek lainnya. Perhatian utama ialah untuk membenarkan kepentingan negara dan ayat itu dipaksa untuk melayaninya tanpa memperhatikan konteks dan maksud Rasul Paulus. Dengan alasan seperti ini, banyak Gereja di Afrika Selatan justru mendukung politik apartheid berupa praktek diskriminasi terhadap penduduk berkulit hitam. Pada zaman Nazi di Jerman pun, kebanyakan pemimpin Gereja menyetujui program Nazi. Mereka berkata bahwa ketaatan kepada Allah menuntut ketaatan kepada penguasa politik karena pemerintah dialaskan atas wibawa Tuhan.

Berbicara mengenai ketaatan kepada pemerintah, maka satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah Wahyu 13. Orang seringkali justru hanya mengutip Roma 13:1-7 saja seolah-olah Wahyu 13 tidak pernah ada. Padahal sejarah menunjukkan bahwa perbuatan pemerintah di muka bumi justru berkisar di antara Roma 13:1-7 dan Wahyu 13.

Selain itu Buku ini menjelaskan tentang perhatian ini tantangan di bidang politik sangat besar dihadapi oleh Gereja dan orang Kristen di Indonesia. Gereja perlu memberikan pengajaran Alkitab tentang negara, pemerintah, warga negara, politik, hukum, dan lain-lain untuk mempersiapkan para anggota jemaat dengan dasar-dasar pengetahuan politik dalam perspektif iman Kristen.

Dengan cara seperti itu Gereja sesungguhnya telah turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dalam bidang pembangunan politik Gereja perlu memikirkan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari kalangan para anggota jemaatnya, sehingga pelayanan tidak hanya terarah kepada hal rohani saja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diperoleh lewat

pendidikan formal masih perlu ditambah dengan proses pengkaderan dalam organisasi-organisasi' Kiranya Buku ini dapat perhatian para pembaca dan menjadi cakrawala pemahaman dalam pendidikan politik.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

BAB I

DASAR ETIS DAN TEOLOGIS BAGI PARTISIPASI KRISTEN

DI BIDANG POLITIK.....	1
------------------------	---

Dasar Teologis	1
-----------------------------	----------

A. Kejatuhan manusia dalam dosa dan keselamatan	1
---	---

B. Keselamatan	5
----------------------	---

C. Konsep kerajaan Allah	6
--------------------------------	---

D. Kehadiran Gereja dan orang Kristen	9
---	---

Dasar Etis	11
-------------------------	-----------

A. Ketaatan Kristen kepada Pemerintah	11
---	----

B. Partisipasi Kristen di bidang politik	19
--	----

Rangkuman	24
------------------------	-----------

BAB II

NEGARA PEMERINTAH DAN WARGA NEGARA

MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945	27
--	----

A. Negara	27
-----------------	----

B. Pemerintah	30
---------------------	----

C. Warga negara	32
-----------------------	----

Rangkuman	33
------------------------	-----------

BAB III

PARTISIPASI KRISTEN INDONESIA DI BIDANG POLITIK	35
--	-----------

Partisipasi politik dalam pergerakan nasional	35
--	-----------

A. Pengantar	35
--------------------	----

B. Organisasi sosial Kristen dalam pergerakan nasional	36
--	----

C. Generasi Muda Kristen Dalam Pergerakan Nasional	39
--	----

D. Partai Politik Kristen dalam pergerakan nasional	42
---	----

E. Nasionalis Kristen dalam Pergerakan Nasional	44
---	----

F. Partisipasi Kristen dalam revolusi fisik	46
G. Partisipasi perorangan	47
H. Partisipasi yang terorganisasi dalam bentuk partai	48
I. Partisipasi Kristen dalam /melalui Pemerintah/Kabinet	52
J. Partisipasi Kristen Dalam/Melalui Pers	53
K. Partisipasi Kristen dalam politik melalui pemilu	53
L. Partisipasi Kristen Dalam Politik Melalui Wali Songo	53
M. Partisipasi Kristen melalui Gereja (PGI)	54
N. Partisipasi Kristen dalam/melalui Golongan Karya	55
O. Partisipasi Kristen dalam / melalui Partai Demokrasi Indonesia ..	55
Pokok-pokok penting dan sumbangsih partisipasi Kristen di bidang politik	55
A. Pokok-pokok penting dari partisipasi Kristen di bidang politik	55
B. Sumbangsih partisipasi Kristen di bidang politik	59
 BAB IV	
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Rekomendasi	63
Kepustakaan	65

BAB I

DASAR ETIS DAN TEOLOGIS BAGI PARTISIPASI KRISTEN DI BIDANG POLITIK

Dasar Teologis

A. Kejatuhan manusia dalam dosa dan keselamatan

1. Kejatuhan manusia dalam dosa

Dalam kejadian 3, alkitab menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu dosa manusia yang pertama. Adapun esensi dari dosa itu, menurut Louis Berkhof, terletak pada kenyataan bahwa Adam meletakkan dirinya dalam keadaan bertentangan. Adam menolak untuk melektakkan kehendaknya di bawah kehendak Allah, dan menolak membiarkan Allah menentukan seluruh hidupnya. Ia secara aktif berusaha mengambilnya dari tangan Allah dan menentukan masa depannya sendiri. Di sini manusia telah memisahkan diri dari Allah dan bertindak seolah-olah ia memiliki hak-hak tertentu terhadap Allah. Jadi, yang menjadi persoalan di dalam Kejadian 3 ialah bahwa manusia ingin merdeka/bebas, sebab ia merasa tidak merdeka/tidak bebas di bawah pemerintah Allah. Manusia ingin menentukan hukum-hukumnya sendiri dan ingin menjadi otonom.

Alkitab menggunakan beraneka macam istilah untuk dosa. Bruce Milnemencatat kata-kata utama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diterjemahkan sebagai "dosa". Kata utama untuk dosa dalam Perjanjian Lama adalah khattat, khet, pesya, syaga, dan awon. Sedang kata utama untuk dosa dalam Perjanjian Baru adalah hamartia, adikia, parabasis, anomia, asebera, dan ptaio.

Adapun defenisi dari dosa, sebagaimana dikatakan oleh Louis Berkhof, ia sebagai "tidak adanya tindakan yang sesuai dengan hukum moral Allah, baik dalam perbuatan, sifat-sifat, maupun keadaan" berkaitan dengan dosa ini, Bruce Milne berkata: "Aspek yang paling khas dari dosa adalah bahwa dosa bertujuan melawan Allah (bnd. Mazmur 51:6, Roma 8:7; Yakobus

4:4) Dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang diajarkan dengan jelas oleh Alkitab (Roma 7:7-13; Galatia 3:10-12; Yakobus 2:8-12; I Yohanes 3:4). Allah itu kudus dan manusia harus menyesuaikan diri dengan kekudusanNya; segala sesuatu yang tidak mencapai sasaran ini disebut dosa (Imamat 19:2; I Petrus 1:15-16). "Jadi, sifat utama dosa adalah terletak pada arahnya yang bertentangan dengan Allah".

Dosa itu universal (I Raja-raja 8:46; Roma 3:1-10, 12,23; Mazmur 14:1), mempengaruhi setiap manusia secara keseluruhan. Dosa manusia segera merambat pada seluruh keberadaannya dan seluruh naturnya tidak ada yang tidak tersentuh dosa. Tidak ada satupun dari segi waktak manusia yang luput dari pengaruh dosa, sehingga tidak ada satu segi dari kehidupan manusia yang dapat dikemukakan untuk menyatakan dirinya benar. Seluruh kepribadian manusia yang dicemari oleh dosa itu, yakni:

- Kehendak (Yoh 8:34; Rm7:14-24; Ef 2:1-3; 2 Petrus 2: 19)
- Pikiran dan pengertian (Kej 6:5; 1 Kor 1: 2; Ef 4:17);
- Perasaan (Rm 1:24-27); 1 Tim 6:10; 2 Tim 3:4); dan
- Ucapan dan perilaku (Mrk 7:21-22; Gal 5: 19-21; Yak 3:5-9).

Keadaan inilah yang disebut dengan kerusakan total (total depravity). Kerusakan total dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang gagal untuk memenuhi ukuran yang menyenangkan Allah. "Kerusakan total berarti manusia tidak pernah dapat melakukan kebajikan sejati yang diinginkan Allah, dan pada kenyataannya manusia selalu berbuat jahat".

Menurut Louis Berkhof, secara positif kerusakan total ini menunjukkan:

- a. Bahwa pencemaran dalam diri manusia meluas ke seluruh bagian natur manusia, ke seluruh elemen penyusun, baik tubuh maupun jiwa; dan
- b. Tidak ada kebaikan rohaniah, yaitu kebaikan dalam hubungan dengan Tuhan dalam diri orang berdosa sama sekali, tetapi yang ada hanyalah perbuatan dosa yang terus menerus dilakukan dengan sengaja"

Alkitab juga mengajarkan bahwa dosa Adam melibatkan seluruh umat manusia. Pemazmur menulis bahwa kerusakan total menjangkau umat manusia sejak bayi: "Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." (Mazmur 51:7). Alkitab mengajarkan bahwa karena satu perbuatan dosa dari satu orang, dosa telah memasuki dunia, dan bersamaan dengan itu semua akibat dosa yang terasa di mana-mana (Roma 5:12-19; I Korintus 15:21-22). Satu orang ini maksudnya adalah Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, karena memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat (Kejadian 3:1-7; I Timotius 2:13-14). Dosa inilah yang disebut dengan dosa asal.

Mengenai dosa asal. Louis berkhof memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Dosa asal dimulai dari tindakan bebas Adam sebagai wakil seluruh umat manusia, suatu pelanggaran atas hukum Tuhan dan pencemaran atas natur manusia, yang menyebabkan manusia harus dihukum oleh Tuhan. Dalam pandangan Tuhan, dosa Adam adalah dosa seluruh keturunannya, sehingga semua keturunan Adam dilahirkan sebagai orang berdosa, yaitu dalam

BAB II

NEGARA PEMERINTAH DAN WARGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Untuk memperoleh pengertian tentang politik, maka sangatlah diperlukan pemahaman mengenai negara, pemerintah dan warga negara. Pembicaraan tentang politik tidak akan ada tanpa pengertian yang jelas tentang ketiga hal tadi, sebab politik itu sendiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan negara. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas tentang negara, pemerintah dan warga negara dalam konteks Indonesia yaitu menurut undang-undang dasar 1945.

A. Negara

Di dalam Perjanjian Lama, eksistensi negara tidaklah termasuk dalam ordo penciptaan (order of creation). Yang dimaksudkan disini adalah bahwa negara tidaklah termasuk di dalam rencana serta karya awal penciptaan Allah. Akan tetapi, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya relasi antara manusia dengan Allah yang rusak, tetapi juga relasi antar manusia, yang berakibat amat destruktif bagi kehidupan. “untuk mencegah kehancuran yang fatal itulah, Tuhan menciptakan institusi negara sebagai bagian ‘ordo pemeliharaan’ (order of providence)”.

Adapun tentang negara ini. DR. J. Verkuyl memberi defenisi sebagai berikut:

“Negara adalah suatu ‘entitas’, suatu ‘keberadaan’, suatu kenyataan yang bersifat politis dan yurids, yang terdiri dari suatu masyarakat manusia yang merupakan suatu golongan yang bebas dalam suatu daerah bersama yang kompak (bersatu-padu), dan yang tunduk kepada suatu penguasa tertinggi.”

Melihat kepada defenisi di atas, tampak adanya syarat bagi apa yang disebut dengan negara. Sehubungan dengan itu, menurut Prof. DR. O. Notohamidjojo, SH, Negara sebagai subyek hukum internasional harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Negara harus mempunyai penduduk, masyarakat atau bangsa negara
2. Negara harus mempunyai wilayah tertentu, yaitu tempat hidup bag masyarakat negara
3. Negara harus mempunyai pemerintah
4. Negara harus mempunyai kemampuan untuk memasuki perhubungan dengan negara-negara lain

Negara (state) menunjuk kepada kesatuan hidup rakyat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama. Negara dalam pengertian ini lebih menunjuk kepada kenyataan organisasinya. Sesuai dengan itu, organisasi ini memerlukan tata cara pengaturan hidupnya, agar dalam kesatuan tersebut tindakan orang-orang di dalamnya bersesuaian satu dengan yang lainnya untuk mengoptimalkan pencapaian cita-cita negara itu. Itulah penyebab pentingnya konstitusi bagi suatu negara sebagai dasar bagi lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan.

Adapun konstitusi republik Indonesia adalah undang-undang dasar 1945. Konstitusi ini memberi pernyataan tentang negara (dalam hal ini negara kesatuan republik Indonesia) serta hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 ini, ketetapan MPRS Nomor XXX/MPRS/1966 menetapkan tata urutan peraturan perundangan republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
5. Peraturan pemerintah
6. Keputusan presiden
7. Peraturan peraturan

Alinea keempat pembukaan Undang-undang dasar 1945 berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi merupakan azas pokok pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Isi dari alinea keempat tadi dapat digolongkan ke dalam empat hal berikut :

1. Tentang hal tujuan daripada Negara Indonesia, yang tercantum dalam kalimat; kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang :

BAB III

PARTISIPASI KRISTEN INDONESIA DI BIDANG POLITIK

Partisipasi politik dalam pergerakan nasional

A. Pengantar

Kegiatan pekabaran Injil sebenarnya telah lama masuk ke Indonesia. Pekabaran Injil ini dilakukan oleh orang-orang Nestorian, sehingga menjadikan berdirinya banyak Gereja di daerah sekitar pancur dan barus, tapanuli, di sekitar pertengahan abad ke-7. Akan tetapi, pada masa-masa selanjutnya, berita tentang orang-orang Kristen tidak pernah terdengar lagi.

Masihada lagi berita-berita tentang Gereja dan orang Kristen di Indonesia pada masa-masa selanjutnya, tapi sejarah Gereja yang benar-benar berkesinambungan sampai sekarang dimulai dengan masuknya portugis di goa pada tahun 1511. Portugis membawa masuk juga misionaris katolik dan penyebaran agama katolik pertama-tama dilakukan di antara penduduk yang masih menganut kepercayaan lama. Akan tetapi, pekerjaan misi yang sungguh-sungguh dan terarah dengan baik adalah dipengaruhi oleh kedatangan Fransiskus Xaverius di tahun 1546-1547. Mula-mula ia bekerja di Ambon, kemudian di Ternate dan Halmahera, kembali di Ternate dan akhirnya di Ambon lagi sebelum ia berangkat ke Jepang.

Pada tanggal 23 Februari 1605, Kompeni masuk ke Indonesia dengan merebut benteng Portugis di Ambon. Bersamaan dengan itu masuk jugalah agama Kristen Protestan. Bagi VOC, sama seperti bagi negara Portugis, kepentingan negara bertindih tepat. Gereja Protestan VOC ini terlalu dikuasai oleh VOC, sehingga banyak hambatan yang membuatnya tidak leluasan melayani. Sampai pada peralihan pemerintahan dari VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1815, Gereja tetap di bawah penguasa pemerintah dengan mendirikan Gereja Negara, yaitu Gereja Protestan Indonesia (Indische Kerk).

Semenjak terjadinya perubahan politik di negeri Belanda dalam pertengahan abad ke-19 terjadi perubahan yang menimbulkan kemerdekaan agama yang

lebih luas golongan-golongan Kristen lain selain Gereja negara GPI diizinkan masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga datanglah badan-badan zending ke Indonesia, misalnya dari Jerman, Swiss, Amerika Serikat, dan lain-lain. Hingga pada akhirnya muncullah tiga kelompok Kristen di Indonesia. Kelompok Kristen ini terdiri dari golongan Kristen yang termasuk Gereja negara GPI, golongan yang berasal dari pekerjaan berbagai badan zending, dan golongan Roma Katolik. Di kemudian hari ada empat Gereja yang memisahkan diri secara administratif dari Gereja negara GPI, yaitu: GMIM, GMIT, GPM dan GPIB.

Politik etis, dengan trisila: irigasi, edukasi dan imigrasi, dilaksanakan pemerintah Belanda sejak tahun 1901 yang gagasan dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan dan azas politiknya adalah mengubah hubungan kolonial dari pemilik menjadi hubungan perwalian. Oleh karena politik etis ini, mulailah sebagian kecil orang pribumi menerima pendidikan. Akan tetapi, meskipun sedikit jumlahnya, namun perannya sangat menentukan dalam pergerakan. Dari kalangan terpelajar itulah bangkit kesadaran nasional. Inilah salah satu "akibat sampingan" politik etis yang kemudian berkembang sebagai jawaban (negatif) bangsa Indonesia terhadap keseluruhan kenyataan kolonialisme adalah munculnya faktor baru dalam masyarakat jajahan: nasionalisme Indonesia.

B. Organisasi sosial Kristen dalam pergerakan nasional

Gerakan nasionalisme yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo oleh dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908 dan kemudian diikuti oleh berdirinya organisasi-organisasi lainnya yang menyebabkan berkobarnya semangat nasionalisme bangsa yang juga mempengaruhi orang-orang Kristen dan Gereja-Gereja di Indonesia. Bahkan kemudian orang-orang Kristen turut mempengaruhi pergerakan nasional ini. Adapun organisasi-organisasi yang berdiri menyusul berdirinya Budi Utomo, antara lain : Serekat Dagang Islam (1909), Serekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Rukun Minahasa (1912), Jong Java (1915), Indische Sociaal Demokratische Vereniging (1915), Indonesische Verbond Van Studerenden di negeri Belanda (1917), Indische Katholieke Partij (1918), Partai Komunis Hindia (1920), Serekat Ambon (1920), Sarekat Timur (1924), diadakan Kongres Pemuda Indonesia dengan pesertanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Islamietendbond, Jong Batak (1926), Perserikatan Nasional Indonesia (1927), PPKI (1927), lahir sumpah pemuda dan lagu Indonesia raya (1928), lahir Indonesia Muda (1930), Hatopan Christen Batak (1930), Kongres Indonesia Raya (1932), Gerindo (1937), dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI, 1939). Kejadian-Kejadian tadi diuraikan hanya untuk menggambarkan suasana dan semangat pergerakan nasional dari tahun 1908, sebagai tahun berdirinya Budi Utomo yang disebut juga dengan Kebangkitan nasional, sampai dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942.

Sikap lembaga-lembaga Kristen di Indonesia, baik dalam kalangan Gereja negara GPI maupun Badan-badan zending, turut menentukan dalam membentuk sikap orang Kristen Indonesia. Orang-orang Kristen yang termasuk Gereja negara GPI dengan sendirinya di bawah pengaruh politik pemerintah sepenuhnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman tentang dosa mempunyai hubungan dengan pemahaman tentang keselamatan. Pemahaman tentang adanya dosa yang mempengaruhi manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesamanya, dengan dirinya, dengan alam semesta dan dengan waktu, akan membawa kepada suatu pemahaman tentang keselamatan yang holistik. Keselamatan yang holistik itu utuh dan menyeluruh, bukan hanya terbatas pada aspek rohani saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek lainnya termasuk aspek politik. Di sinilah aspek politik mendapat perhatian dan tidak diabaikan sebagai sesuatu yang tidak penting bahkan tidak ditabukan lagi.

Masuk kerajaan Allah identik dengan diselamatkan. Dengan demikian, konsepsi kerajaan Allah adalah salah satu manifestasi nyata dari keselamatan yang holistik. Kerajaan Allah juga adalah pemerintahan Allah atas seluruh ciptaan, sehingga penyelamatan dalam kerajaan Allah adalah penyelamatan segala sesuatu, yaitu seluruh ciptaan. Di sini umat Allah terpanggil untuk menjadi mitra Allah dalam mewujudkan kerajaan Allah. Untuk itu Gereja dan orang-orang Kristen harus memberitakan Injil kerajaan Allah tentang pertobatan dan pembaharuan serta menegakkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu: kasih, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan dalam konteks sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial - budaya.

Sebagai warga kerajaan Allah yang sekaligus adalah warga negara, maka orang Kristen harus taat kepada negara/pemerintah. Akan tetapi, ketaatan kepada Allah melebihi daripada ketaatan kepada negara/pemerintah, karena "kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia" (Kisah 5:29). Disinilah, Gereja dan orang Kristen bertanggung jawab untuk menjaga supaya kekuasaan pemerintah tidak merosot yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan Gereja dan orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk merangsang dan mendorong pemerintah supaya menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Partisipasi Kristen dalam bidang politik di Indonesia sudah dimulai sejak kebangkitan nasional dengan turut aktif dalam pergerakan nasional. Bahkan orang-orang Kristen banyak yang menjadi pelapor dan pemimpin dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Gereja-Gereja di Indonesia juga turut berpartisipasi dalam bidang politik terutama semenjak dibentuknya DGI/PGI. Partisipasi Kristen di bidang politik ini tetap berlangsung secara terus menerus hingga sekarang dengan pemahaman yang lebih mendalam.

Pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan zending di masa lalu menghasilkan kaum muda intelektual Kristen yang cukup banyak jumlahnya dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Kaum muda intelektual Kristen inilah yang banyak turut aktif dalam pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pemuda yang mereka bentuk terutama CSV op Java menjadi wadah pengkaderan bagi kaum muda intelektual ini. Dari mereka inilah kemudian hari yang banyak menjadi pemimpin-pemimpin, baik pemimpin Gereja maupun pemimpin masyarakat. Jadi, ada dua hal yang sangat menonjol dari munculnya para pemimpin ini, yaitu: memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai serta mengalami pengkaderan di dalam organisasi-organisasi pemuda Kristen. Kedua hal ini sangat menonjol bagi bangkitnya tokoh-tokoh Kristen di dalam masyarakat dan negara. Penegakan pancasila sebagai dasar negara secara terus menerus mengalami ancaman, sehingga menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan secara terus menerus. Perjuangan penegakan ini membutuhkan partisipasi Kristen di bidang politik. Partisipasi Kristen tidak hanya diperlukan sebatas penegakan pancasila sebagai dasar negara, tetapi turut juga mengenai penerapan pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang panjang lebar tentang partisipasi Kristen di bidang politik dengan meninjau kembali mengenai partisipasi Kristen protestan Indonesia di bidang politik semenjak kebangkitan nasional, maka penulis mengajukan saran-saran yang dirasakan perlu, yaitu :

1. Gereja dan umat Kristen di Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap bidang politik mengingat adanya beban tanggung jawab politiknya. Perhatian ini perlu ditekankan mengingat tantangan di bidang politik ini sangat besar dihadapi oleh Gereja dan orang Kristen di Indonesia.
2. Gereja perlu memberikan pengajaran Alkitab tentang negara, pemerintah, warga negara, politik, hukum, dan lain-lain untuk mempersiapkan para anggota jemaat dengan dasar-dasar pengetahuan politik dalam perspektif iman Kristen. Dengan cara seperti ini Gereja sesungguhnya telah turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dalam bidang pembangunan politik
3. Gereja perlu memikirkan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari kalangan para anggota jemaatnya, sehingga pelayanan tidak

KEPUSTAKAAN

Abineno, J.L. Ch

1987 MANUSIA DAN SESAMANYA DI DALAM DUNIA, Jakarta;
BPK Gunung Mulia

1965 OIKOUMENE, Gereja DAN MASYARAKAT, Jakarta: Badan
Penerbit Kristen.

Abednego Martinus

1993 PARTISIPASI, dalam Weinata Sairin & Kurnia Atje (ed.),
SELAMA HARI MASIH SIANG, Jakarta: PT BPK Gunung
Mulia, hlm. 382-426

Alfian, DR

1981 Pengantar ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia pustama utama

Bagus, Lorens

1996 PANGGILAN BERPOLITIK, dalam suara pembaruan, Jakarta
28 Januari 1996, hlm 3

Banawiratma, J.B.,SJ. (ed)

1990 SPIRITUALITAS TRANSFORMATIF: SUATU PERGUMULAN
EKUMENIS, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Banawiratma, J.B.,SJ. dan Suwarno, P.J. (ed.)

1996 TEOLOGI KEMERDEKAAN: SEBUAH TINJAUAN LINTAS
BIDANG, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Banawiratma, J.B.,SJ. Dan Muller, J., SJ

1993 BERTEOLOGI SOSIAL LINTAS ILMU, YOGYAKARTA:
Penerbit Kanisius

Basinger, David dan Randall (ed.)

1995 PREDENTINASI & KEHENDAK BEBAS, Jakarta; Lembaga
Reformed Injili Indonesia

- Berkhof, Hendrik
 1980 Kristus DAN KUASA-KUASA, Jakarta BPK Gunung Mulia-
 untuk persetia.
- Berkhof, DR. H. dan Enklaar, DR. I
 1995 SEJARAH Gereja, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Berkhof, Louis
 1994 TEOLOGI SISTEMATIK 2, Jakarta: Lembaga Reformed Injili
 Indonesia.
- Boland, B.J
 1951 Percakapan tentang Gereja, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Brownlee, Malcolm
 1993 TUGAS MANUSIA DALAM DUNIA MILIK TUHAN: DASAR
 THEOLOGIS BAGI PEKERJAAN ORANG Kristen DALAM
 MASYARAKAT, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
 1992 KETERLIBATAN DAN KEWIBAWAAN MANUSIA DALAM
 LINGKUNGAN ALAM, Jakarta: BPK Gunung Mulia
 1996 HAI PEMUDA, PILIHLAH!, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Budiardjo, Prof. Miriam, MA
 1980 Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Calvin, Yohanes
 1985 INSTITUTIO: PENGAJARAN AGAMA Kristen, Jakarta: BPK
- Davidson, F. dan Martin, Ralph P
 1994 TAFSIRAN Alkitab MASA KINI 3 (MATIUS-WAHYU), Jakarta:
 Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Darmaputera, Eka, PhD
 1992 PANCASILA: IDENTITAS DAN MODERNITAS, Jakarta: PT
 BPK Gunung Mulia
 1993 HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM NEGARA
 PANCASILA, dalam Weinata Sairin & Kurnia Atje (ed.),
 SELAMA HARI MASIH SIANG, Jakarta: PT BPK Gunung
 Mulia, hlm. 76-86.
 1994 ASPEK-ASPEK ETIS-TEOLOGIS HUBUNGAN Gereja-
 NEGARA DAN IMPLIKASINYA DALAM NEGARA
 PANCASILA, dalam Weinata Sairin & J.M. Pattiasina (ed.),
 HUBUNGAN Gereja DAN NEGARA DNA HAK AZASI
 MANUSIA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, hlm. 13-22
 1997 AGAMA DAN NEGARA: ASPEK SPIRITUAL, MORAL DAN
 ETIK DALAM GBHN 1993 (suatu telaah hubungan agama-
 negara dalam perspektif negara pancasila), Jakarta: Makalah
 seminar di STT Jakarta, 22 April 1997

Darmodiharjo, Prof. Dardji, SH. Dkk

- 1979 SANTIAJI PANCASILA (Kumpulan Karangan), Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI)

- 1984 HARAPAN DAN KEPRIHATINAN BANGSA DAN NEGARA MEMASUKI AKHIR ABAD KE-20; LAPORAN KONFERENSI NASIONAL Gereja, MASYARAKAT DAN NEGARA, 20-25 Agustus 1984, di Kuta, Bali
- 1980 NOTULEN SIDANG RAYA IX DGI 13-31 Juli 1980 Tomohon, Sulawesi Utara.

Djiwandono, J. Soedjati, PhD

- 1995 Setengah abad negara pancasila: tinjauan kritis ke arah pembaharuan, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

End, DR. Th. Van Den

- 1995 HARTA DALAM BEJANA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- 1996 Ragi Carita 1, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- 1989 Ragi Carita 1, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Gultom, R.M.S. (ed.)

- 1992 TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Guthrie, Donald

- 1995 TEOLOGI PERJANJIAN BARU 1, Jakarta; PT BPK Gunung Mulia
- 1995 TEOLOGI PERJANJIAN BARU 2, Jakarta; PT BPK Gunung Mulia
- 1993 TEOLOGI PERJANJIAN BARU 3, Jakarta; PT BPK Gunung Mulia

Griffiths, Michael

- 1991 GEREJA DAN PANGGILANNYA DEWASA INI, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Groenen, DR. C., OFM

- 1989 SOTERIOLOGI ALKITABIAH, Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Hadiwijono, dr. Harun

- 1988 IMAN Kristen, Jakarta: BPK Gunung Mulia

Halim, A. Ridwan, SH.,Dipl. Th

- 1993 ESENSI DAN EKSISTENSI UMAT Kristen DALAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DI NEGARA HUKUM REPUBLIK Indonesia, Jakarta: Yayasan Bethel.

- Hartono, DR. Chris, dkk. (ed)
 1995 PERJUMPAAN Gereja DI Indonesia DENGAN DUNIANYA Yang SEDANG BERUBAH, Jakarta: Persetia.
- Havlik, John F.
 1991 Gereja yang injili, Bandung: Lembaga Literatur Baptis
- Holmes, Arthur G.
 1990 Segala kebenaran adalah kebenaran Allah, Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia
- Hutauruk, DR. J.R
 1993 Kemandirian Gereja: penelitian historis-sistematis tentang gerakan kemandirian Gereja di sumatera utara dalam kacamata pergolakan kolonialisme dan gerakan kebangsaan di Indonesia, 1899-1942, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Isjiwara, F., SH., LIM
 1982 PENGANTAR ILMU POLITIK, Bandung: Penerbit Binacipta
- Jongeneel, J.A.B.
 1976 HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT DEKLARASI-DEKLARASI DAN KONVENSI-KONVENSI PBB DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (Terjemahan Th. Van den end dkk.), Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Latuihamallo, Prof. DR. P.D.dkk. (ed.)
 1995 KEWARGANEGARAAN Yang BERTANGGUNGJAWAB: MENGENANG DR. J. LEIMENA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Latuihamallo, Prof. DR. P.D
 1995 BEBERAPA CATATAN TENTANG RELASI Gereja DAN NEGARA, dalam P.D. Latuihamallo dkk. (ed.), KEWARGANEGARAAN Yang BERTANGGUNGJAWAB: MENGENANG DR. J. LEIMENA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, Hlm. 216-223
 1972 KEYAKINAN DAN PERJUANGNA, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Leimena, DR. J
 1989 Gereja, NEGARA DAN KEINSYAFAN POLITIK, dalam J.C.T. Simorangkir, MANUSCRIPT SEJARAH PARKINDO, Jakarta: Yayasan Komunikasi, hlm. 430-437
 1995 KEWARGANEGARAAN Yang BERTANGGUNGJAWAB, dalam P.D. Latuihamallo dkk. (ed), KEWARGANEGARAAN LEIMENA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

sLembaga Ketahanan Nasional

1995 KEWIRAAN UNTUK MAHASISWA, Jakarta: PT GRAMEDIA
PUSTAKA UTAMA

Lembaga Sukarno-Hatta

1984 SEJARAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DAN PANCASILA, Jakarta: Inti Idayu Press

Linder, Robert D. & Pierard, Richard V

1975 Politics: A Case For Christian Action, Illionis: Intervarsity Press

Kuyper, DR. Abraham

1961 LECTURES ON CALVINISM, Michigam: Grand Rapids, wm. B.
Eerdmans Publishing Company.

Kansil, Drs. C.S.T., SH

1975 PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
DASAR FALSAFAH NEGARA, Jakarta: PT Radnya Paramita.

1979 PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
PENDIDIKAN MORAL PANCASILA, Bagian Pertama,
Jakarta: Pradnya Paramita

1979 PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM Indonesia,
Jakarta: PN Balai Pustaka

Kansil, Drs. C.S.T., SH (ed.)

1978 PENJABARAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA, Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, PN Balai Pustaka.

Konperensi Lausanne I 1974

1988 IKRAR LAUSANNE (LAUSANNE COVENANT), dalam V
Scheunemann, Dogma Kristen, Malang: YPPIL, 1988, Hlm 151-
161

Kraybill, Donald B

1993 KERAJAAN Yang SUNGSANG, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Latuihamallo, Prof. DR. P.D.

1984 TEOLOGI DAN NASIONALISME, dalam S. Wismoady
Wahono (ed.), TABAH MELANGKAH, Jakarta: STT Jakarta,
hlm. 81-106

Leirissa, Drs. R.Z., MA

1995 BIOGRAFI DR. J. LEIMENA, dalam P.D. Latuihamallo
dkk. (ed.), KEWARGANEGARAAN YANG
BERTANGGUNGJAWAB: MENGENANG DR. J. LEIMENA,
Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, hlm. 1-103

Luisi, PI

1990 MENENTUKAN PILIHAN POLITIS, Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Mangunwijaya, Y.B

1996 Politik moral itu hak setiap orang, *DALAM Mutiara* 841 Tahun xxx, 3-9 Desember 1996, hlm. 4-5

Matondang, H.M. Victor, SH. (ed.)

1995 PERCAKAPAN DENGAN DR. T.B. SIMATUPANG, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

1989 PARKINDO 24 TAHUN, dalam J.C.T. Simorangkir, *MANUSCRIPT SEJARAH PARKINDO*, Jakarta: Yayasan Komunikasi, hlm. 411-419.

Marx, DR. Dorothy Irene

1990 USUL Gereja BERTEOLOGI MASA KINI, dalam T.B. Simatupang dkk. (ed.), *TANTANGAN GEREJA DI INDONESIA MENUJU TAHUN 2000*, Surabaya: Yakin.

McNeill, John T.

1996 CALVIN DAN PEMERINTAHAN SIPIL, dalam *Momentum* 31, September 1996, hlm 16-29.

1978 KONFESI AUGSBURG 1530, Pematang Siantar: Huria Kristen Indonesia

Milne, Bruce

1993 MENGENALI KEBENARAN, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Nababan, DR. S.A.E

1968 PANGGILAN KRISTEN DALAM PEMBAHARUAN MASYARAKAT : LAPORAN KONPERENSI NASIONAL GEREJA DAN MASYARAKAT, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

1969 APA KATA UPSALA, Jakarta: Badan Penerbit Kristen

Nadeak, Moxa dkk

1995 KRISIS HKBP: UJIAN BAGI IMAN DAN PENGAMALAN PANCASILA, Biro Informasi HKBP

Nasution, Drs. Pontas

1993 TANGGUNG JAWAB ORANG KRISTEN DALAM BIDANG POLITIK, dalam Weinata Sairin & Kurnia Atje (ed.), *SELAMA HARI MASIH SIANG*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, hlm. 330-337.

Ngelow, DR. Zakaria J

- 1996 KEKRISTENAN DAN NASIONALISME: PERJUMPAAN UMAT Kristen PROTESTAN DENGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1900-1950, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- 1993 TUNAS ZAITUN LIAR CANGKOKAN: KRISTEN DAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA, dalam J.M. Pattiasina & Weinata Sairin (ed.), GERAKAN OIKOUMENE: TEGAR MEKAR DI BUMI PANCASILA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, hlm. 3-16
- 1997 VISI KRISTEN DAN DINAMIKA POLITIK, dalam Suara Pembaruan, 16 Pebruari 1997, hlm. 3.

Natohamidjojo, Prof. DR. O.,SH

- 1952 IMAN KRISTEN DAN POLITIK, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- 1969 TANGGUNGJAWAB GEREJA DAN ORANG KRISTEN DI BIDANG POLITIK, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

Paimoen, DR. Eddy

- 1997 GEREJA DAN POLITIK, Jakarta: Berita Oikoumene, April 1997, hlm. 6-10

Palmer, Edwin

- 1996 5 POKOK CALVINISME, Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia.

Patmono, SK, S.Th

- 1988 GERAKAN GANDA: SEJARAH PERGERAKAN PEMUDA KRISTEN INDONESIA, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Pattiasina, DR. J.M. dan Sairin, Weinata, MTh. (ed.)

- 1993 GERAKAN OIKOUMENE: TEGAR MEKAR DI BUMI PANCASILA: BUKU PERINGATAN 40 TAHUN PGI, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

- 1996 LIMA DOKUMEN KEESAAAN GEREJA: KEPUTUSAN SIDANG RAYA XII PGI JAYAPURA, 21-30 OKTOBER 1994, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Pixley, George V

- 1990 KERAJAAN ALLAH, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Probowinoto, Ds. B

- 1989 POLITIK, dalam J.C.T Simorangkir, MANUSCRIPT SEJARAH PARKINDO, Jakarta: Yayasan Komunikasi, hlm. 420-421

Simatupang, DR. T.B

- 1995 IMAN KRISTEN DAN PANCASILA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- 1995 KEHADIRAN KRISTEN DALAM PERANG, REVOLUSI DAN PEMBANGUNAN: BERJUANG MENGAMALKAN PANCASILA DALAM TERANG IMAN, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- 1987 DARI REVOLUSI KE PEMBANGUNAN, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- 1967 TUGAS KRISTEN DALAM REVOLUSI, Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- 1986 HARAPAN, KEPRIHATINAN DAN TEKAD, Jakarta: Inti Idayu Press
- 1990 KUMPULAN TULISAN DR. T.B. SIMATUPANG, Jaya pura: Panitia Nasional Konperensi Studi Nasional dan Kongres GMKI XII.

Simatupang, DR. T.B

- 1996 PERANAN AGAMA-AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM NEGARA PANCASILA YANG MEMBANGUN, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia,
- 1987 GEREJA DALAM PENDAKIAN PUNCAK SEJARAH DUNIA, Yogyakarta: Yayasan ANDI.
- 1990 TANTANGAN GEREJA DI INDONESIA MENUJU TAHUN 2000, Surabaya: Yakin

Sijabat, DR. W.B. (ed.)

- 1967 PARTISIPASI KRISTEN DALAM NATION-BUILDING, Jakarta: Departemen Studi dan Penelitian DGI.

Sijabat, DR. W.B., Tariantio, Drs. Dan Leirissa, Drs. R.Z., MA

- 1990 BENANG BIRU DIMENSI KEESAAN DAN KEBANGSAAN, Jakarta: Pengurus Pusat GMKI.

Sinaga, Dewi Sri

- 1993 HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA, Thesis STT Jakarta, tidak dipublikasikan)

Siahaan, DR. Hotman, dkk

- 1997 GEREJA DI PENTAS POLITIK, Jakarta: YAKOMA PGI

Sopater, Soelarso

- 1997 GEREJA DAN POLITIK, Jakarta: Berita Oikoumene, April 1997, hlm. 34

Sproul, R.C.

- 1991 ETIKA & SIKAP ORANG Kristen, Malang: Penerbit Gandum Mas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia

- 1986 BAHAN PENATARAN, Jakarta: Cicero Indonesia
1992 SAMBUTAN PRESIDEN PADA MALAM DHARMA CANTI HARI RAYA NYERI TAHUN CAKA 1914, PADA TANGGAL 9 APRIL 1992, DI JAKARTA

Simorangkir, DR.Mr.J.C.T

- 1989 MANUSCRIPT SEJARAH PARKINDO, Jakarta: Yayasan Komunikasi

Suseno, Frans Magnis

- 1986 KUASA DAN MORAL, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
1994 ETIKA POLITIK, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Stott, John

- 1994 ISU-ISU GLOBAL: MENANTANG KEPEMIMPINAN KRISTIANI, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.

Susabdda, DR. Yakub B

- 1991 KAUM INJILI: MEMBANGKITKAN KEMBALI IMAN KRISTIANI ORTODOKS, Malang: Gandum Masyarakat.
1994 PENGANTAR KE DALAM TEOLOGI REFORMED: SEBUAH PENOLONG UNTUK MEMAHAMI KEDALAMAN, KEUNIKAN DAN PERKEMBANGAN TEOLOGI REFORMED DARI MASA JOHN CALVIN SAMPAI AKHIR ABAD XX, Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia.

Tong, Stephen

- 1996 RINGKASAN KHOTBAH MIMBAR REFORMED INJILI, Jakarta: Gereja Reformed Injili Indonesia

Tambunan, DR. A.M.,SH

- 1989 KRISTEN DAN POLITIK, dalam J.C.T. Simorangkir, MANUSCRIPT SEJARAH PARKINDO, Jakarta: Komunikasi.

Titaley, DR. John

- 1994 HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA: SUATU ANALISIS SOSIO-HISTORIS TERHADAP HUBUNGAN Gereja-GEREJA DI INDONESIA DENGAN REPUBLIK INDONESIA dalam Weinata Sairin & J.M. Pattiasina (ed.), HUBUNGAN Gereja DAN NEGARA DAN HAK-HAK AZASI MANUSIA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

- Ukur, DR. Fridolin
 1971 TANTANG-JAWAB SUKU DAYAK, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Ukur, DR. Fridolin dan Cooley, DR. F.L
 1979 JERIH DAN JUANG; LAPORAN NASIONAL SURVEY MENYELURUH GEREJA-GEREJA DI INDONESIA, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi - DGI.
- Verkuyf, DR. J.
 1989 ETIKA KRISTEN: RAS, BANGSA, Gereja DAN NEGARA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Wardaya, Baskara T., SJ.
 1995 SPIRITUALITAS PEMBEBASAN, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Weber, Hans-Ruedi
 1993 KUASA: SEBUAH STUDI ALKITABIAH, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Wellen, Frederik Djara
 1982 MR. AMIR SYARIFUDDIN: TEMPATNYA DALAM KEKRISTENAN DAN DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN Indonesia (Thesis STT Jakarta)
- Wongso, DR. Peter
 1993 TANTANGAN BAGI GEREJA: TANGGAPAN TEOLOGIS ATAS KRISIS POLITIK DI AFRIKA SELATAN, JAKARTA: PT BPK Gunung Mulia
- Wright, DR. Christopher
 1996 HIDUP SEBAGAI UMAT Allah: ETIKA PERJANJIAN LAMA, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Yewangoe, DR. A.A.
 1997 Gereja DAN POLITIK, Jakarta: Berita Oikomene, April, hlm. 34
- Yewangoe, DR. Andreas A
 1983 Pendamaian, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ridderbos, DR. H. dan Baarlink, Drs. H.
 1975 Pemberitaan Yesus menurut Injil sinoptis, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 1993 KETETAPAN-KETETAPAN Majelis Permusyawaratan Rakyat-Republik Indonesia 1993, Jakarta: Bumi Aksara.
- Susabda, DR Yakub B
 1994 BERNEGARA & BERPOLITIK, dalam Momentum 22, April 1994, hlm. 11-19

Kartodidjo, Sartono, dkk

1976 SEJARAH NASIONAL Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua.

Kurang, DR. Sadrakh

1997 MATERI KULIAH PENGEMBANGAN JEMAAT MISIONER
Jakarta : IFTK Jaffray, Januari 1997

Herlianto

1991 MASALAH PERKOTAAN DAN PELAYANAN Gereja, dalam
Jurnal Pelita Zaman, Volume 6 No. 2. 1991. Hlm. 154-165

Dopo, Eduard R. (ed.)

1992 KEPRIHATINAN SOSIAL Gereja, Yogyakarta: Penerbit
Kanisius.

Suseno, DR. Frans Magnis, SJ

1992 IMAN DAN POLITIK, dalam Eduard R. Dopo,
KEPRIHATINAN SOSIAL Gereja, Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, Hlm. 33-41.

PARTISIPASI KRISTEN DALAM DUNIA POLITIK

Di Era Pra Kemerdekaan Hingga Orde Baru

Buku tentang Partisipasi Kristen dalam dunia Politik di era Pra Reformasi Indonesia adalah buku sejarah tentang partisipasi Kristen baik semenjak Pra kemerdekaan hingga masa zaman Orde Baru Dalam buku ini dijelaskan bahwa Gereja dan orang Kristen di Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap bidang politik mengingat adanya beban tanggung jawab politiknya.

Berbicara mengenai ketaatan kepada pemerintah, maka satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah Wahyu 13. Orang seringkali justru hanya mengutip Roma 13:1-7 saja seolah-olah Wahyu 13 tidak pernah ada. Padahal sejarah menunjukkan bahwa perbuatan pemerintah di muka bumi justru berkisar di antara Roma 13:1-7 dan Wahyu 13.

Selain itu, Buku ini menjelaskan tentang perhatian ini tantangan di bidang politik sangat besar dihadapi oleh Gereja dan orang Kristen di Indonesia. Gereja perlu memberikan pengajaran Alkitab tentang negara, pemerintah, warga negara, politik, hukum, dan lain-lain untuk mempersiapkan para anggota jemaat dengan dasar-dasar pengetahuan politik dalam perspektif iman Kristen.

Dengan cara seperti itu Gereja sesungguhnya telah turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dalam bidang pembangunan politik Gereja perlu memikirkan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari kalangan para anggota jemaatnya, sehingga pelayanan tidak hanya terarah kepada hal rohani saja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diperoleh lewat pendidikan formal masih perlu ditambah dengan proses pengkaderan dalam organisasi-organisasi' Kiranya Buku ini dapat perhatian para pembaca dan menjadi cakrawala pemahaman dalam pendidikan politik.



Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

Alumni PPRA 54 Lemhannas RI. Beliau adalah seorang Dosen dan bergiat pada Moderasi beragama dan dialog antar umat beragama. Konsen Pada kajian pertahanan dan keamanan serta gerakan Oikoumene.